

Lagi, ForBALI Turun ke Jalan

Tuntut Pembatalan Proses Amdal Reklamasi Teluk Benoa

Denpasar (Bali Post) -

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) kembali menggelar aksi turun ke jalan di seputaran Renon, Denpasar, Sabtu (24/10) kemarin. Ribuan massa bergerak dari parkir timur menuju gedung DPRD Bali dan Kantor Gubernur. ForBALI masih menuntut pembatalan proses amdal, pencabutan Perpres No.51 tahun 2014 dan pembatalan rencana menguruk Teluk Benoa. "Rencana reklamasi Teluk Benoa sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat di dua pusat wilayah terkait reklamasi. Baik di tempat pasir yang mau diambil untuk menguruk yakni NTB dan Bali sebagai tempat yang mau diuruk," ujar Koordinator Divisi Politik ForBALI, Suriadi Darmoko.

Terkait penolakan ini, lanjut Suriadi, Ke-

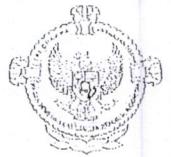
menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semestinya menghentikan proses amdal yang tengah berlangsung, proses amdal reklamasi Teluk Benoa tidak saja ditolak masyarakat juga tidak berlangsung secara terbuka. Masyarakat sampai saat ini tidak bisa mengakses dokumen kerangka acuan atau bahkan prakerangka acuan amdal. Akibatnya, masyarakat tidak bisa berpartisipasi penuh dalam proses amdal reklamasi.

Hal. 19

Tak Miliki KLHS

DEMO - Ribuan massa kembali demo untuk membatalkan proses amdal dan menolak rencana Reklamasi Teluk Benoa, Sabtu (24/10) kemarin.





Sambungan - - -

Tak Miliki KLHS

Dari Hal. 1

"Secara substansi, proyeknya sudah ditolak. Baik pengurusan maupun pengerukan. Secara proses, ini prosesnya tertutup. Tahu-tahu sudah melakukan rapat konsultasi, tahu-tahu ada rapat teknis. Bahkan kalau kita melihat proses konsultasinya, kami diundang konsultasi H-1. Bahan nggak ada, kita datang diundang diskusi dengan posisi tidak setara," paparnya.

Suriadi menambahkan, rencana reklamasi yang mengakibatkan perubahan bentang alam harusnya didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun, Bali sampai saat ini tidak memiliki KLHS. Termasuk Perpres 51 yang melandasi reklamasi juga belum memiliki syarat formal tersebut. Pemerintah dan investor justru cenderung melakukan manipulasi informasi.

"Nanti KLHS ini yang bisa melihat apakah proyek ini cocok apa tidak. Kalau kita melihat situasi wilayah di Bali Selatan, maka jelas tidak cocok karena daya dukung lingkungan di Bali Selatan itu sudah sangat terbatas. Situasi hari ini kan mereka (investor, red) memasang jebakan. Jebakannya adalah Teluk Bena selalu dibilang terjadi pendangkalan," jelasnya.

Koordinator ForBALI,

Wayan "Gendo" Suardana mengatakan, proses amdal sampai saat ini terus berjalan di Kementerian. Ada bagian dari proses itu yang tidak bisa dipantau oleh ForBALI. Termasuk tentang sejauh mana tahapan amdal sudah berlangsung.

"Proses amdal yang tidak transparan itu harus dibatalkan. Kemudian juga meminta ketegasan Jokowi untuk mencabut Perpres 51 karena itu sumbernya. Ketiga, juga meminta Menteri Susi untuk segera menerbitkan moratorium reklamasi untuk pembangunan hotel di laut. Tiga ini yang penting," ujarnya.

Sementara di tingkat lokal, pihaknya mendesak DPRD Bali agar menghentikan segala cara dan upaya untuk melegitimasi reklamasi. Salah satunya melalui upaya merevisi Perda No.16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali. Ketimbang merevisi RTRW, lanjut Gendo, DPRD Bali sebagai perwakilan rakyat Bali seharusnya mengkritisi terbitnya Perpres 51.

"Seharusnya DPRD mengkritisi kenapa ada pembangunan jalan tol, kemudian ada perubahan kawasan lewat Perpres 51. Kenapa Perpres 51 munculnya setelah ada proposal atau polemik reklamasi setelah investor terhambat untuk mereklamasi karena di kawasan konservasi. Harusnya kan DPRD begitu," tegasnya. (kmb32)



Tokoh Bali Berkumpul

Sikap Reklamasi Teluk Benoa dan KSPN Besakih



BPM/rin

TOKOH- Sejumlah tokoh Bali bertemu di rumah mantan Gubernur Bali Dewa Beratha membahas nasib Bali ke depan.

Denpasar (Bali Post) -

Sejumlah tokoh masyarakat Bali berkumpul untuk memperjuangkan Bali tetap ajeg di kediaman mantan Gubernur Bali, Dewa Beratha, Sabtu (24/10) kemarin. Mereka di antaranya Dewa Beratha, A.A. Suryawan, Supartha Djelantik, A.A. Gede Rai, Agung Sujana, Ketut Darmika, I.A. Sriachi, I Made Iwan Dewantama, I Gde Made Sadguna, Ketut Rahyuda, Ida Pandita Shre Begawan Penyarikan, dan I Nyoman Suma Artha.

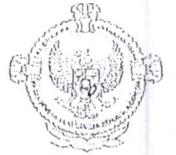
Ida Pandita Shre Begawan Penyarikan menjelaskan pertemuan *semeton* di rumah mantan gubernur adalah menyetukan sikap dan persepsi untuk bagaimana kita memperjuangkan Bali supaya ajeg ke depan. Lebih lanjut, Ida

Pandita dari Geria Taman Sari Sidha Karya ini menggarisbawahi persoalan yang tengah dihadapi Bali. Yakni rencana reklamasi Teluk Benoa dan KSPN Besakih.

Hal. 19
Jangan Diuruk

Edisi : Minggu, 25 Oktober 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Jangan Diuruk

Dari Hal. 1

Berdasarkan tattwa dan lontar Bali, pantai dan laut merupakan tempat yang disucikan umat Hindu.

"Kalau ingin mengembangkan investasi, jangan dong itu diuruk. Itu sudah betul-betul menyinggung kesucian dari orang Bali. Kenapa kita berjuang untuk (menolak) reklamasi dengan Besakih, tattwanya ada itu. Tidak semata-mata ditinjau dari sudut ekonomi. Jadi, sudut yang sangat horizontal, sangat vertikal sekali, Bali itu kalau dibiarkan direklamasi, Bali akan hancur total, *niskala-sekala*," jelasnya.

Sebagai seorang pandita, Begawan Penyarikan sangat menyangkan ada pandita atau sulinggih yang justru terlibat dalam rencana itu. Dalam arti, turut mendukung dan ikut campur ke dalam urusan materi. Padahal, seorang pandita atau sulinggih semestinya mengingatkan secara tattwa dan agama.

"Sekaranglah saatnya sulinggih itu *ngetohin* bumi, dengan ajaran kebenaran. Kapan lagi sulinggih akan menunjukkan kesucian beliau di dalam kebenaran dan kedharman kalau tidak sekarang. Cuma tidak boleh ikut campur di dalam urusan material," tegasnya.

Anggota Love Bali Forum, A.A. Suryawan, menambahkan, megaprojek reklamasi Teluk Bena dan KSPN Besakih telah menciptakan ke-

resahan di tengah masyarakat Bali. Oleh sebab itu, pihaknya merasa harus melakukan sesuatu untuk menolak rencana tersebut. Pasalnya, dampak negatif yang ditimbulkan akan besar sekali, khususnya bagi sosial budaya masyarakat Bali.

"Kami tidak setuju dengan rencana-rencana yang kami anggap bisa mengganggu keharmonisan Bali yang selama ini kita bangun berdasarkan *Tri Hita Karana*. Kelihatannya memang rencana megaprojek tersebut sangat jauh lepas dari dasar-dasar filosofi *Tri Hita Karana* tersebut," ujarnya.

Suryawan mengatakan, pihak-pihak yang menolak selama ini dianggap *silent minority*. Dengan kata lain, hanya dilihat sebagai minoritas dibandingkan dengan orang-orang yang menyuarakan pro terhadap rencana reklamasi ataupun KSPN. Entah pro secara jujur dari hati nurani atau karena iming-iming tertentu.

"Kita harus terus berjuang dengan spirit puputan berdasarkan dharma untuk mencapai tujuan kita membuat Bali ini tetap ajeg. Membuat Bali ini tetap lestari sosial budayanya. Itu yang harus kita pegang teguh," jelasnya.

Sementara itu, Iwan Dewantama dari LSM Lingkungan Konservasi Internasional mengatakan, masyarakat Bali mempunyai tanggung jawab untuk menjaga apa yang menjadi kekayaan alam di Pulau Dewata. Sama seperti

di Indonesia yang mempunyai hutan cukup luas, itu dipandang penting untuk menjaga paru-paru dunia. Begitu juga Bali dengan kearifan lokal dan kekayaan alam di darat maupun di laut pertama-tama harus menjadi tanggung jawab orang Bali, sebelum menuntut tanggung jawab nasional untuk menjaga Bali.

"Kami dari Konservasi Internasional selaku LSM Lingkungan mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini tidak diketahui orang banyak. Misalnya seberapa kaya laut kita, tidak banyak orang tahu ada ratusan spesies ikan, ratusan spesies terumbu karang, termasuk kita menemukan spesies karang endemik Bali yang hanya hidup di Candi-dasa. Ini seharusnya menjadi kebanggaan kita sebagai orang Bali," ujarnya.

Iwan menambahkan, pihaknya ingin menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap Bali. Setelah rasa cinta tumbuh, maka akan tumbuh pula rasa tanggung jawab untuk menjaga alam yang dimiliki pulau ini. Bali tidak anti dengan pembangunan, namun pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tentu saja berbasis sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dimiliki Bali. Bali harus menjadi contoh implementasi pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi semacam isu global. Sehingga ke depan, pulau ini akan lebih dekat dengan solusi, bukan dengan berbagai masalah. (kmb32)

Edisi : Minggu, 25 Oktober 2015

Hal : 19